



LKIP TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec.Cimahi Utara
Telepon (022) 6632308

Laman bappenda.cimahikota.go.id Po-el : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dalam waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan aktual serta berorientasi pada hasil. Mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja rencana strategis Tahun 2023-2026 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif pihak terkait, sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang memadai serta sebagai evaluasi acuan operasional Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola anggarannya, sehingga dapat terukur tingkat keberhasilannya, selain itu bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pencapaian sasaran dari kegiatan, pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Cimahi, Maret 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Bappenda Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan Bappenda, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

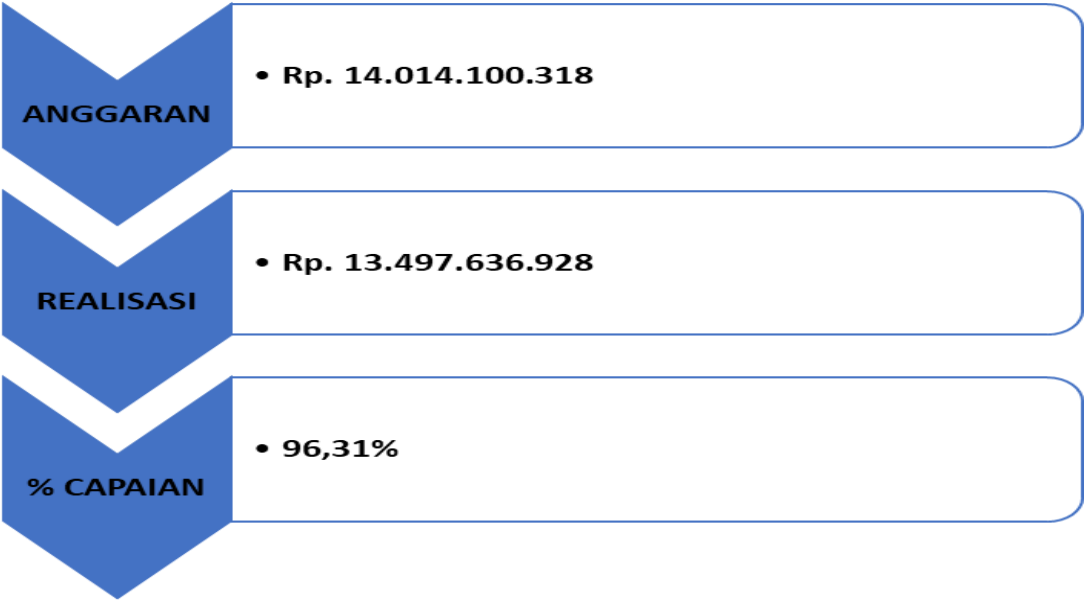
Selain pencapaian target tahun 2023, laporan kinerja tahun 2023 ini juga menginformasikan pencapaian target renstra tahun 2023-2026 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun kesatu.

Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah

- Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD terhadap Pendapatan Daerah :
- Target : 29,19%
- Realisasi : 30,43%
- Capaian : 104,25%
- Tingkat Provinsi Tahun 2022 : 70%

Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik

- Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
- Target : 30 Nilai
- Realisasi : 90,86 Nilai
- Capaian : 302,87%
- Rata-Rata Kabupaten/ Kota : 59,32 Nilai



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan
Daerah Kota Cimahi..... I-6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Gambaran Organisasi	I-5
1.3.1.Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	I-5
1.3.2.Sumber Daya Manusia	I-15
1.3.3.Sumber Daya Aset/ Modal	I-17
1.4 Aspek Strategis	I-18
1.5 Isu Strategis	I-19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-2
3.1.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	III-2
3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Program.....	III-8
3.1.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	III-12
3.1.1.4. Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan.....	III-20
3.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dengan Tahun Lalu.....	III-27

3.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (RENSTRA).....	III-29
3.1.1.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dengan Tingkat Nasional/Provinsi.....	III-32
3.1.1.8. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	III-35
3.1.1.9. Program-Program Terkait Sasaran Strategis...	III-36
3.1.1.10. Analisis Efisiensi.....	III-37
3.2. Realisasi Anggaran.....	III-38
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Status/ Golongan dan Jenis Kelamin Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.....	I-16
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.....	I-17
Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.....	II-3
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Eselon II Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	II-4
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon III Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	II-4
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Eselon IV/ Jabatan Fungsional Penyetaraan Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	II-5
Tabel 2.5	Program dan Anggaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	II-8
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	II-9
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-2
Tabel 3.2	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	III-3
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023.....	III-4

Tabel 3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-4
Tabel 3.5	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-5
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.....	III-6
Tabel 3.7	Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-7
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-8
Tabel 3.9	Perbandingan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-9
Tabel 3.10	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-10
Tabel 3.11	Indeks Profesionalitas ASN Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-11
Tabel 3.12	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-12
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-13
Tabel 3.14	Data Wajib Pajak daerah Kota Cimahi yang Ditetapkan Menjadi SKPD Tahun 2023.....	III-14
Tabel 3.15	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-15
Tabel 3.16	Layanan Administrasi Keuangan Bappenda Tahun 2023.....	III-16

Tabel 3.17	Layanan Administrasi Kepegawaian Bappenda Tahun 2023.....	III-17
Tabel 3.18	Layanan Administrasi Umum Bappenda Tahun 2023.....	III-17
Tabel 3.19	Fasiitasi Gedung/ Kantor yang Diadakan Bappenda Tahun 2023.....	III-18
Tabel 3.20	Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor Bappenda Tahun 2023.....	III-19
Tabel 3.21	Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Bappenda Tahun 2023.....	III-20
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-20
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Tahun Lalu Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022.....	III-27
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023.....	III-28
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.....	III-29
Tabel 3.26	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-30
Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023.....	III-31
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.....	III-32

Tabel 3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Level Provinsi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-32
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Level Provinsi Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023.....	III-33
Tabel 3.31	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Kota/ Kabupaten Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.....	III-34
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.....	III-38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring bertambahnya umur Kota Cimahi, khususnya Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi diharapkan dapat mengenal lebih jauh mengenai Kota Cimahi, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi masyarakat Cimahi, dan Jawa Barat pada umumnya.

Telah disahkannya PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP.

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah daerah Kota Cimahi yang bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721 Tambahan Berita Daerah Nomor 203).

1.3. Gambaran Organisasi

1.3.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

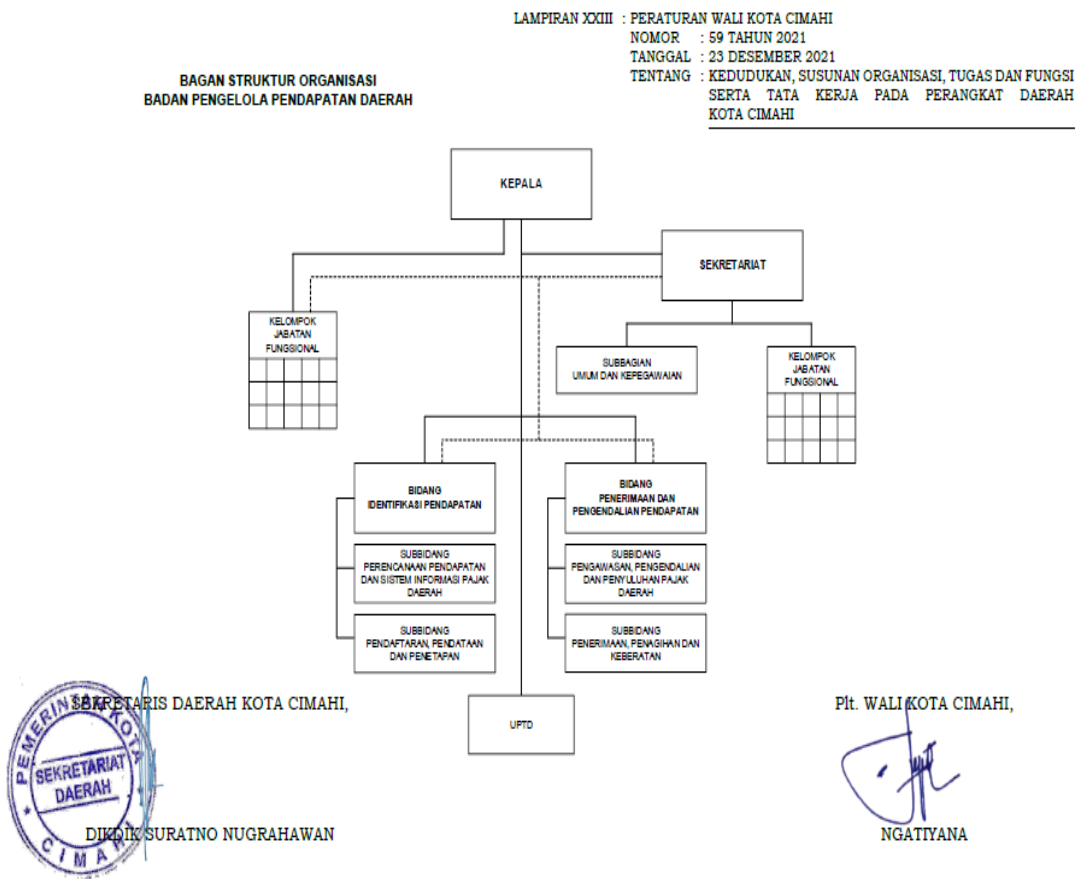
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Daerah;

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Bagan 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021, Bappenda Kota Cimahi mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas Badan Pengelola Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

1. Badan

a. Tugas

Membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

a. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program serta pengelolaan keuangan Badan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan dan pengoordinasian perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pelaporan Badan;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara Badan;
- 3) Perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penatausahaan keuangan Badan;
- 4) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- 5) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Badan;
- 6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mengoordinasikan rincian tugas :

- 1) Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis Badan;
- 2) Mengoordinasikan dan menyusun program dan rencana kerja lingkup Badan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring program, kegiatan dan kinerja lingkup Badan;
- 4) Mengoordinasikan dan menyusun laporan lingkup Badan;
- 5) Merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan Badan;
- 6) Menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan;
- 7) Melaksanakan teknis pengelolaan penatausahaan keuangan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan;
- 8) Melaksanakan verifikasi dokumen keuangan di lingkungan Badan;

- 9) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban di lingkungan Badan; dan
- 10) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 4) Mengoordinasikan dan fasilitasi penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- 5) Melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
- 6) Melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian dan disiplin pegawai;
- 7) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 9) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Identifikasi Pendapatan

a. Tugas

Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan bidang identifikasi pendapatan.

b. Fungsi

- 1) Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 3) Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

5. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah
Pada Bidang Identifikasi

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah;
- 3) Melakukan kajian dan analisa potensi pajak daerah baik tarif maupun dasar pengenaan pajak daerah;
- 4) Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
- 5) Menyusun dan mengolah data potensi pajak daerah sebagai bahan dalam menyusun target pendapatan;
- 6) Membangun, mengelola, mengembangkan dan memelihara aplikasi sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi;
- 7) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 10) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

6. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pada Bidang Identifikasi Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) dan maklumat wajib pajak;
- 3) Melakukan update dan memperbaiki kesalahan data/pembetulan objek pajak pada saat adanya perubahan data pada sistem informasi pendapatan daerah;
- 4) Melakukan pendataan (ekstensifikasi dan verifikasi objek pajak) serta pengolahan data terhadap objek dan subjek pajak daerah;
- 5) Melaksanakan perhitungan, penetapan, penerbitan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT), surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan;
- 6) Melaksanakan pendistribusian dan evaluasi surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan (SPPT PBB) perkotaan;
- 7) Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui;
- 8) Melaksanakan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan ketetapan pajak daerah;
- 9) Mendistribusikan dan menerima kembali serta mengadministrasikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak daerah;

- 10) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB);
- 11) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- 13) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 14) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

7. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan.

Fungsi

- 1) Perencanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 2) Pengelolaan urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 3) Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

8. Subbidang Pengawasan, Pengendalian, dan Penyuluhan Pajak Daerah
Pada Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah;
- 3) Melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan pemungutan pajak daerah;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyuluhan pajak daerah dalam rangka pembinaan kepatuhan wajib pajak;
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyiapan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan banding ke majelis pertimbangan pajak dan retribusi atas materi penetapan pajak dan retribusi;
- 7) Menyusun naskah dinas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah;
- 8) Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pajak daerah ke dalam kartu persediaan barang cetakan;
- 9) Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah;
- 10) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

9. Subbidang Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan Pada Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Tugas

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pembukuan pendapatan daerah;
- 3) Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah;
- 4) Menyusun laporan tunggakan Pajak Daerah;
- 5) Menyusun pembukuan dan pelaporan seluruh pendapatan Daerah;
- 6) Melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan pendapatan secara berkala;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan Bank Persepsi berkaitan realisasi pendapatan daerah;
- 8) Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- 9) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- 10) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- 11) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah;
- 12) Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- 13) Memproses kompensasi pajak daerah;
- 14) Memproses kedaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- 15) Mengelola piutang dan penghapusan piutang pajak daerah;
- 16) Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17) Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
- 18) Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemberdayaan aparatur yang lebih berhasil guna dimasa yang akan datang, di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dituntut melaksanakan kinerja aparatur yang lebih baik. Sosok aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang mantap sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugasnya.

Pembinaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dimaksudkan agar semua unsur penunjang pembangunan pemerintahan Kota Cimahi (baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, maupun mekanisme kerjanya) perlu diarahkan pada suatu tujuan yang sama.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan prima, maka perlu ditempuh pembinaan dan mengikuti pelatihan-pelatihan. Maksud hal tersebut adalah agar seluruh aparatur dapat :

1. Memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
2. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
3. Memiliki kinerja yang cukup tinggi dan kompeten.

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian yang merupakan gambaran formasi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Posisi Bulan Desember Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 1.1
 Data Pegawai
 Berdasarkan Status/ Golongan dan Jenis Kelamin
 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Status/ Golongan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	Pegawai Negeri Sipil				
1	IV	C	1	-	1
		B	-	1	1
		A	3	1	4
	Jumlah Gol.IV		4	2	6
2	III	D	3	2	5
		C	6	1	7
		B	5	2	7
		A	5	0	5
	Jumlah Gol.III		19	5	24
3	II	D	5	-	5
		C	1	-	1
		B	-	-	-
		A	-	-	-
	Jumlah Gol. II		6	-	6
B	PPPK				
	IX / III	A	-	1	1
	Jumlah Gol III		-	1	1
	Jumlah		29	8	37
C	Pegawai Non PNS				
1	Tenaga Honorer/ Tidak Tetap		-	-	-
2	Tenaga Harian Lepas		18	11	29
	Jumlah		18	11	29
	Jumlah Total		47	19	66

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi

Tabel 1.2
Data Pegawai
Berdasarkan Pendidikan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Pendidikan	Jumlah
A	Jumlah Pegawai PNS	37
1	Pasca Sarjana S-2	6
2	Sarjana S-1	13
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	7
5	Diploma II	0
6	SLTA/ Setara	9
7	SLTP/ Setara	1
8	SD	-
B	Jumlah Pegawai Non PNS	29
1	Pasca Sarjana S-2	-
2	Sarjana S-1	18
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	5
5	Diploma II	-
6	SLTA/ Setara	5
7	SLTP/ Setara	-
8	SD	-
	JUMLAH TOTAL	66

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi

1.3.3. Sumber Daya Aset/ Modal

Sumber daya aset/ modal utama di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2023 yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, antara lain :

- a. Bangunan kantor utama beserta kelengkapan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Bapenda sendiri berada di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi lantai 3.

b. Kendaraan terdiri dari :

- Kendaraan Operasional Kedinasan Roda 4 sebanyak 1 buah
- Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2 sebanyak 4 buah
- Kendaraan Operasional/ Mobil Pelayanan Keliling Roda Empat sebanyak 5 buah

c. Ruang Pelayanan Pajak Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberikan pelayanan pembayaran Pajak Daerah pada masyarakat di ruangan yang terpisah dari bangunan kantor utama Bappenda. Ruang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah terletak di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi lantai 2 Sayap Kanan.

1.4. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas fiskal Kota Cimahi;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Pengembangan Kesisteman (Digitalisasi);
5. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;
6. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas operasional kedinasan yang memadai;

7. Menyediakan aparatur yang terampil dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya;
8. Melayani masyarakat / wajib pajak dengan optimal.

1.5. Isu Strategis

Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi berdasarkan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Optimalisasi kemandirian /otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada dalam kategori sedang).
2. Optimalisasi peningkatan PAD Kota Cimahi terutama dari sektor penerimaan hasil pajak daerah (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi belum signifikan).
3. Optimalisasi implementasi Digitalisasi/ Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas.
4. Penyusunan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehubungan dengan turunnya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai dasar dalam penarikan pajak dan retribusi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi dan arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Penyusunan perencanaan kinerja ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi, yaitu :

VISI : Cimahi Kota Cerdas

MISI : 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

4. Mewujudkan Kesenjangan Pembangunan yang Berkeadilan

5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPD 2023-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Dimana strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan.

Pencapaian tujuan tersebut strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi dalam pencapaiannya, perlu arah kebijakan-kebijakan yang harus diterapkan antara lain :

1. Pemeliharaan dan pengembangan/ digitalisasi sistem perpajakan;
2. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai;
3. Cetak massal dan sosialisasi SPPT PBB;
4. Memuktahirkan data-data pajak yang ada;
5. Berkoordinasi dengan PD penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target;
6. Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah;
7. Mengurangi penyimpangan pajak daerah;
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
9. Meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Berikut tabel keterkaitan misi dengan tujuan, sasaran, berserta Indikator Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, yaitu :

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Misi	Tujuan		Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. (diolah).

2.2. Perjanjian Kinerja

Tujuan dari perjanjian kinerja merupakan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui

perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

Berikut ini perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 untuk eselon II, III dan IV/ Jabatan Fungsional Penyetaraan Birokrasi, dan Anggaran per program yang diselaraskan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 serta dokumen - dokumen lainnya, yaitu :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	29,19%

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah setiap tahunnya	-0,32%
		Persentase realisasi pajak daerah	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 Nilai
		Indeks Profesionalitas ASN	58 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon IV/ Jabatan Fungsional Penyetaraan Reformasi Birokrasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
1.	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	117.500 WP
		Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	2 dokumen
		Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	2 dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	8 laporan
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2 unit
		Jumlah laporan hasil pendataan, pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	3 laporan
		Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan
		Jumlah pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 OP
		Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	117.500 dokumen
		Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	118.700 WP
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.400 dokumen
		Jumlah dokumen hasil penyelesaian permohonan keberatan pajak daerah	419 dokumen
		Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	525 dokumen
		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	13 dokumen
		Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	2 laporan

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
2.	Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15 dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA_SKPD	1 dokumen
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lapran hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan
		Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan	12 bulan
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1 laporan
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	2 kegiatan
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang

No	Sasaran Strategis Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Perubahan
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 orang
		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum	12 bulan
		Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 laporan
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	100 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang diadakan	12 bulan
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 bulan
		Jumlah kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kendaraan
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 alat

Sumber : Perjanjian Kinerja (PERKIN) Perubahan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel 2.5
Program dan Anggaran
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Program	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.714.068.268,-
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.300.032.050,-
JUMLAH		Rp. 14.014.100.318,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Sasaran			Program	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Kegiatan			
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)				Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	29,19%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	-0,32%	Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	dokumen	117.500
				Persentase realisasi pajak daerah	100%				
Meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	30 Nilai	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 Nilai	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	15
				Indeks Profesionalitas ASN	58 Nilai	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	Bulan	12
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan administasi kepegawaian	kegiatan	2
						Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	bulan	12
						Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Julah bulan fasilitasi gedung/kantor yang diadakan	bulan	12
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12
						Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	bulan	12

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Untuk memberikan gambaran mengenai nilai kinerja, dinilai berdasarkan skala nilai peringkat kinerja yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi :

- Lebih dari 100% = Sangat Baik
- 80 sampai dengan 100% = Baik
- 55 sampai dengan <80% = Cukup
- <55% = Kurang

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.1.1.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	29,19%	30,43%	104,25%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	30 Nilai	90,86 Nilai	302,87%	Sangat Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi, mempunyai 2 (dua) sasaran strategis, terdiri dari :

1. Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah yang mana ini merupakan sasaran strategis kota juga, capaian kinerjanya dilihat dari persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya pada tahun 2023 sangat baik yaitu sebesar **30,43%** meningkat **0,78%**. Posisinya **39,57 %** masih dibawah provinsi jawa barat perbandingan dengan capaian pada tahun 2022. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya sudah melebihi harapan yaitu sebesar **104,25%** meningkat **1,08%** dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **102,39%**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi tahun 2023. Penilaian kriteria tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang** meningkat dari tingkat desentralisasi fiskal tahun sebelumnya yaitu berada di tingkat **Cukup**.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

Tabel. 3.2
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (Halim 2014)

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah, terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Dimana realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 425.618.307.001,- sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.398.833.023.915,-, maka realisasi persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya sebesar 30,43%.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi
Potensi Daerah
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Target	28,74%	29,19%	
Realisasi	29,65%	30,43%	
Capaian Kinerja Tahun Ini (%)	103,17%	104,25%	Meningkat

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.405.186.978.585	1.398.833.023.915	99,55
Pendapatan Asli Daerah	407.477.197.230	425.618.307.001	104,45
Hasil Pajak Daerah	193.265.398.170	210.047.188.688	108,68
Hasil Retribusi Daerah	12.033.217.745	12.952.863.977	107,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.627.628.409	11.627.628.409	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190.550.952.906	190.990.625.927	100,23
Pendapatan Transfer	997.709.781.355	973.214.716.914	97,54
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	822.029.968.399	806.034.916.636	98,05
Pendapatan Transfer Antar daerah	175.679.812.956	167.179.800.278	95,16

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

Tabel 3.5
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Uraian	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp.)		% Naik/ Turun
	Tahun 2022	Tahun 2023	
PENDAPATAN DAERAH	1.331.038.275.111,53	1.398.833.023.915	5,09
Pendapatan Asli Daerah	394.676.719.570,53	425.618.307.001	7,84
Hasil Pajak Daerah	193.890.140.403	210.047.188.688	8,33
Hasil Retribusi Daerah	11.294.029.342	12.952.863.977	14,69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597	11.627.628.409	5,49
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	178.469.866.228,53	190.990.625.927	7,02
Pendapatan Transfer	936.361.555.541	973.214.716.914	3,94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	772.058.311.872	806.034.916.636	4,40
Pendapatan Transfer Antar daerah	158.775.075.669	167.179.800.278	5,29

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dan Tahun 2022 (diolah - nonaudit BPK).

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 mengalami peningkatan/ kenaikan sebesar **5,09%** dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, dimana realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.398.833.023.915,- sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.331.038.275.111,53,-, dengan besaran kenaikan hasil penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 67.794.748.803,47,-. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi pada tahun 2023 mengalami peningkatan/ kenaikan sebesar **7,84%** dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Dimana realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 425.618.307.001,- sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 394.676.719.570,53,-, dengan besaran kenaikan hasil penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 30.941.587.430,47,-.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, capaian kinerjanya dilihat dari Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sangat baik yaitu mempunyai nilai sebesar **90,86** meningkat nilainya sebesar **12,45**. Posisinya **31,54 Nilai** diatas rata-rata kabupaten/ kota. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sudah melebihi harapan yaitu sebesar **302,87%** meningkat **202,87%** dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **259,60%**. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, pengukurannya berdasarkan hasil pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri dan dievaluasi oleh evaluator-evaluator Kota Cimahi, dimana nilai tersebut didapat dari beberapa instrumen indikator penilaiannya, diantaranya :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Target	N/A	30 Nilai	
Realisasi	78,41 Nilai	90,86 Nilai	
Capaian Kinerja Tahun Ini (%)	100%	302,87%	Meningkat

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – non validasi).

Tabel 3.7
Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

INDIKATOR PENILAIAN				BOBOT	NILAI	NILAI AKHIR	%	KETERANGAN
1				2	3	4	5	6
I. RB GENERAL PD				100,00		90,86	90,86	
	A.	Capaian Sasaran Strategis		52,00		45,38	87,28	
		1.	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	8,00	98,33	7,87	98,33	Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah
		2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	8,00	76,80	6,14	76,80	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
		3.	Capaian IKU Perangkat Daerah	8,00	100,00	8,00	100,00	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
		4.	Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	7,00	90,28	6,32	90,28	Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP
		5.	Laporan Realisasi Anggaran	7,00	95,21	6,66	95,21	Persentase Capaian Realisasi APBD tahun sebelumnya dan tahun berjalan
		6.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	7,00	59,90	4,19	59,90	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK
		7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	7,00	88,52	6,20	88,52	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi
	B.	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB		35,00		32,48	92,79	
		1.	Indeks Reformasi Hukum	7,00	100,00	7,00	100,00	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah
		2.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	7,00	89,74	6,28	89,74	Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor
		3.	Tingkat Digitalisasi Arsip	7,00	100,00	7,00	100,00	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah
		4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	7,00	100,00	7,00	100,00	Nilai Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE
		5.	Indeks Profesionalitas ASN	7,00	74,19	5,19	74,19	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah
	C.	Capaian Strategis Pelaksanaan RB General		13,00		13,00	100,00	
		1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	100,00	7,00	100,00	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
		2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	6,00	100,00	6,00	100,00	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB General
TOTAL NILAI RB PD				100,00		90,86	90,86	

Sumber : LKE Pengukuran RB Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

3.1.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Program

Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang mencerminkan berfungsinya keluaran program. Capaian kinerja sasaran program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, diantaranya :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Program
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-0.32%	8,33%	2803,13 %	Sangat Baik
		Persentase realisasi pajak daerah	100%	108,68%	108,68%	Sangat Baik
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	76,80	108,17%	Sangat Baik
		Indeks Profesionalitas ASN	57,50	80,83	140,57%	Sangat Baik
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	88,52	118,03%	Sangat Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – nonaudit).

Capaian kinerja sasaran program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari 8 sasaran dan 5 indikator kinerjanya, sebagai berikut :

1. Sasaran program tercapainya realisasi target pajak daerah pada tahun 2023, Capaian kinerja sasaranannya diatas **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam meningkatkan penerimaan hasil pajak daerah, terdapat 2 (dua) indikator kinerjanya, dengan indikator-indikatornya sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar **2803,13%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam meningkatkan penerimaan hasil pajak daerah. Adapun realisasi kinerjanya sebesar **8,33%** dari target kinerjanya sebesar **-0,32%**.

Hasil pengukuran kinerja sasaran program terdiri dari realisasi hasil penerimaan pajak daerah tahun berjalan tahun 2023 terhadap realisasi hasil penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya tahun 2022, Dimana hasil penerimaan pajak daerah tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp. 210.047.188.688,- sedangkan realisasi hasil penerimaan pajak daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp. 193.890.140.403,-, maka peningkatan target pajak daerah setiap tahunnya pada tahun 2023 adalah sebesar 8,33%, dengan jumlah peningkatan penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 16.157.048.285,-.

Tabel 3.9
Perbandingan Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022

Uraian	Penerimaan Hasil Pajak Daerah (Rp.)		% Naik/ Turun
	Tahun 2023	Tahun 2022	
HASIL PAJAK DAERAH	210.047.188.688	193.890.140.403	8,33
Hotel	496.217.756	300.018.582	65,40
Restoran	25.426.661.921	23.132.936.631	9,92
Hiburan	359.013.252	461.850.519	-22,37
Reklame	4.418.639.600	2.988.440.000	47,86
Penerangan Jalan	42.284.388.475	41.170.519.697	2,71
Parkir	1.098.042.476	1.128.146.604	-2,67
Air Tanah	23.335.953.825	15.724.487.391	48,41
BPHTB	49.444.869.836	51.047.178.518	-3,14
Bumi dan Bangunan Perkotaan	63.183.401.547	57.936.562.461	9,06

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dan Tahun 2022 (diolah - nonaudit BPK).

b. Persentase realisasi pajak daerah pada tahun 2023 capaian kinerjanya sebesar **108,68%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam meningkatkan penerimaan hasil pajak daerah. Adapun realisasi kinerjanya sebesar **108,68%** dari target kinerjanya sebesar **100%**.

Hasil pengukuran kinerja sasaran program terdiri dari realisasi hasil penerimaan pajak daerah tahun 2023 terhadap target penerimaan pajak daerah tahun 2023, Dimana hasil penerimaan pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp. 210.047.188.688,- sedangkan target penerimaan pajak daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp. 193.265.398.170,-, maka realisasi pajak daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 108,68%, dengan jumlah hasil penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 16.781.790.518,-.

Tabel 3.10
Realisasi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
HASIL PAJAK DAERAH	193.265.398.170	210.047.188.688	108,68
Hotel	410.652.716	496.217.756	120,84
Restoran	24.951.164.757	25.426.661.921	101,91
Hiburan	300.000.000	359.013.252	119,67
Reklame	4.125.214.200	4.418.639.600	107,11
Penerangan Jalan	41.269.473.535	42.284.388.475	102,46
Parkir	1.043.751.000	1.098.042.476	105,20
Air Tanah	19.351.951.648	23.335.953.825	120,59
BPHTB	41.860.846.904	49.444.869.836	118,12
Bumi dan Bangunan Perkotaan	59.952.343.410	63.183.401.547	105,39

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

2. Sasaran Program Terlayannya Pelaksanaan Fungsi Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, dan Kepegawaian serta Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2023, capaian kinerjanya diatas **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, terdapat 3 (tiga) indikator kinerjanya, dengan indikator-indikatornya, sebagai berikut :
- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebesar **76,80** Nilai atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik. Adapun realisasi kinerjanya sebesar **76,80 Nilai** dari target kinerjanya **71 Nilai**.
 - b. Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2023 sebesar **140,57%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Adapun realisasi kinerjanya sebesar **80,83 Nilai** dari target kinerjanya sebesar **57,50 Nilai**.

Tabel 3.11
Indeks Profesionalitas ASN
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

BAPPENDA	DIMENSI IP ASN				TOTAL IP ASN
	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	
RATA-RATA DIMENSI IP ASN	21,30	25,07	29,46	5,00	80,83

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi (diolah).

c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 sebesar **118,03%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam pelayanan terhadap wajib pajak masyarakat Kota Cimahi. Adapun realisasi kinerjanya sebesar **88,52 Nilai** dari target kinerjanya sebesar **75 Nilai**.

Tabel 3.12
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2023

BAPPENDA	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur = <i>Total nilai per unsur</i> <i>jumlah responden</i>	$\frac{353}{100}$ = 3.53	$\frac{332}{100}$ = 3.32	$\frac{337}{100}$ = 3.37	$\frac{400}{100}$ = 4.00	$\frac{323}{100}$ = 3.23	$\frac{361}{100}$ = 3.61	$\frac{375}{100}$ = 3.75	$\frac{375}{100}$ = 3.75	$\frac{363}{100}$ = 3.63
Total nilai semua unsur	353+332+337+400+323+361+375+375+363 = 3219								
Skor KM Total = <i>Total nilai semua unsur</i> <i>jumlah responden</i> x $\frac{100}{4}$	$\frac{3219}{100 \times 9} \times \frac{100}{4} = 3.54 \times 25 = 88.52$								

Sumber : Sekretariat Bappenda Kota Cimahi (diolah).

3.1.1.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sasaran kegiatan harus spesifik, terukur, terarah, realistis, dan tepat waktu. Capaian kinerja sasaran kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, diantaranya :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Kinerja Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

N o	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Terkelolanya Penerimaan Pajak Daerah dengan Baik	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	117.500 WP	118.724 WP	101,04%	Sangat Baik
2.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	100%	Baik
3.	Terkelolanya administrasi keuangan dengan baik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
4.	Terkelolanya administrasi kepegawaian dengan baik	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Baik
5.	Terlaksananya layanan umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
6.	Tersedianya barang milik daerah yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
7.	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemda	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
8.	Terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemda	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

Capaian kinerja sasaran kegiatan Bappenda Kota Cimahi terdiri dari 8 sasaran dan 8 indikator kerjanya, sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan terkelolanya penerimaan pajak daerah dengan baik

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **101,04%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam meningkatkan penerimaan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi Data Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan menjadi SKPD tahun 2023 terhadap target Data Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan menjadi SKPD tahun 2023, Dimana target Data Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan menjadi SKPD tahun 2023 berjumlah 117.500 WP sedangkan realisasi Data Wajib Pajak yang ditetapkan menjadi SKPD tahun 2023 berjumlah 118.724 WP, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 101,04%.

Tabel 3.14
Data Wajib Pajak Daerah Kota Cimahi yang Ditetapkan Menjadi SKPD Tahun 2023

Uraian	Target	Realisasi	%
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	116.300	117.571	101,09
Pajak Daerah Lainnya	1.200	1.153	96,08
Jumlah	117.500	118.724	101,04

Sumber : Bidang Identifikasi Pendapatan Daerah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

2. Sasaran kegiatan tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tahun 2023 terhadap target jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, Dimana target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tahun 2023 berjumlah 15 dokumen sedangkan realisasinya berjumlah 15 dokumen, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.15
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2 dok	2 dok	100%
	Dokumen Penganggaran	4 dok	4 dok	100%
	Dokumen Pelaporan Kinerja	4 dok	4 dok	100%
	Dokumen Evaluasi Kinerja	5 dok	5 dok	100%
Jumlah		15 dok	15 dok	100%

Sumber : Sekretariat Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

3. Sasaran kegiatan terkelolanya administrasi keuangan dengan baik

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan tahun 2023 terhadap target jumlah fasilitasi administrasi keuangan tahun 2023, Dimana

target jumlah fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah tahun 2023 sebesar 12 bulan sedangkan realisasinya sebesar 12 bulan, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.16
Layanan Administrasi Keuangan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%
	Pelaporan Keuangan setiap Bulan (Laporan Fisik dan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun)	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Sekretariat Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

4. Sasaran kegiatan terkelolanya administrasi kepegawaian dengan baik
- Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.
- Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah pelaksanaan kegiatan adminsitrasasi kepegawaian tahun 2023 terhadap target jumlah pelaksanaan kegiatan adminsitrasasi kepegawaian tahun 2023, Dimana target jumlah pelaksanaan kegiatan adminsitrasasi kepegawaian tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan sedangkan realisasinya sebanyak 2 kegiatan, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.17
Layanan Administrasi Kepegawaian
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan Pegawai Bappenda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Bimbingan Teknis	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

5. Sasaran kegiatan terlaksananya layanan umum perkantoran

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah tahun 2023 terhadap target jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah tahun 2023, Dimana target jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah tahun 2023 selama 12 bulan sedangkan realisasinya selama 12 bulan, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.18
Layanan Administrasi Umum Yang Disediakan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan alat rumah tangga	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%
	Fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

6. Sasaran kegiatan tersedianya barang milik daerah yang diadakan

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan tahun 2023 terhadap target jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan tahun 2023, Dimana target jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan tahun 2023 selama 12 bulan sedangkan realisasinya selama 12 bulan, maka capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Tabel 3.19
Fasilitasi Gedung/ Kantor yang Diadakan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan gudang arsip	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

7. Sasaran kegiatan tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2023 terhadap target jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2023, Dimana target jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2023 selama 12 bulan sedangkan realisasinya selama 12 bulan, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Tabel 3.20
Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Layanan Jasa Pengelolaan Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	100%
	Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

8. Sasaran kegiatan terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Capaian kinerja sasaran kegiatannya sebesar **100%**, atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023.

Hasil pengukuran kinerja sasaran kegiatan terdiri dari realisasi jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara tahun 2023 terhadap target jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara tahun 2023, Dimana target jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara tahun 2023 selama 12 bulan sedangkan realisasinya selama 12 bulan, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Tabel 3.21
Barang Milik Daerah Yang Dipelihara
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Kegiatan	Uraian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kedinasan	12 bulan	12 bulan	100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

3.1.1.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Sasaran-sasaran sub kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2023, diantaranya :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	2	100,00
2	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00
3	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok RKA-SKPD	Dok	1	1	100,00
4	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
5	Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dok perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	100,00
6	Tersusunnya pelaporan kinerja yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Lap	4	4	100,00
7	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Lap	5	5	100,00
8	Terfasilitasinya gaji dan tunjangan bagi ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	37	37	100,00
9	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Lap	1	1	100,00
10	Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang terkoordinasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Lap	1	1	100,00
11	Meningkatnya pengetahuan bagi pegawai	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	70	70	100,00
12	Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan bimtek	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	8	8	100,00

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
13	Terfasilitasinya komponen listrik/ penerangan untuk bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00
14	Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor bagi pegawai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	100,00
15	Terpeliharanya kebersihan perkantoran dengan baik	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2	2	100,00
16	Terpenuhinya kebutuhan logistik perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,00
17	Terpenuhinya kebutuhan layanan operasional perkantoran	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100,00
18	Terfasilitasinya tamu yang berkunjung	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Lap	12	8	67,00
19	Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Lap	100	108	108,00
20	Tersedianya sarana kerja bagi pegawai	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	9	9	100,00
21	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang representatif	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	1	100,00
22	Terkelolanya surat menyurat melalui jasa layanan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Lap	4	4	100,00
23	Terbayarkannya jasa komunikasi (telepon dan internet) dan listrik tepat waktu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Lap	12	12	100,00

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
24	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	10	10	100,00
25	Berfungsinya sarana dan prasarana peralatan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	62	50	81,00
26	Tersedianya dokumen target pendapatan yang terencana	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dok	2	2	100,00
27	Tersediannya dokumen hukum dan atau kebijakan mengenai perpajakan	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Dok	2	2	100,00
28	Meningkatnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Lap	8	8	100,00
29	Tersedianya sistem pengelolaan pajak daerah yang efektif	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	2	3	150,00
30	Tersedianya data objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang telah terdaftar	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Lap	3	3	100,00
31	Tersedianya data pajak daerah yang valid	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Lap	3	3	100,00
32	Tersedianya data objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	145	100	69

No	Sasaran Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
33	Tersedianya data wajib pajak yang ditetapkan	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dok	117.500	117.571	100,06
34	Tersedianya data pajak daerah yang telah diteliti dan diverifikasi	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dok	118.700	118.724	100,02
35	Terlaksananya penagihan terhadap wajib pajak	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dok	1.400	1.400	100,00
36	Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dok	419	419	100,00
37	Meminimalisir wajib pajak yang tidak patuh/ taat	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dok	525	525	100,00
38	Tersedianya data penerimaan retribusi daerah hasil rekonsiliasi	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Lap	13	13	100,00
39	Tersedianya transaksi pembayaran pajak daerah secara elektronik/ digital	Elektронifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronikasi transaksi pemerintah daerah	Lap	2	2	100,00

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

Hasil keluaran (output) dari capaian kinerja dari sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah terdiri dari 1 dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 dan 1 Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.
2. Tersusunnya dokumen RKA-SKPD yang terkoordinasi terdiri dari 1 dokumen RKA SKPD tahun 2024.
3. Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang terkoordinasi, terdiri dari 1 dokumen perubahan RKA SKPD tahun 2023.

4. Tersusunnya dokumen DPA-SKPD yang terkoordinasi, terdiri dari 1 dokumen DPA tahun 2024.
5. Tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD yang terkoordinasi, terdiri dari 1 dokumen perubahan DPA tahun 2023.
6. Tersusunnya pelaporan kinerja yang terkoordinasi terdiri dari : 1 laporan LKIP, 1 laporan LKPJ, 1 laporan LPPD, dan 1 laporan hasil survey kepuasan Masyarakat.
7. Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah terdiri dari 4 dokumen evaluasi terhadap renja, dan 1 dokumen SAKIP.
8. Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 37 orang selama 12 bulan.
9. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang terkoordinasi, terdiri dari 1 laporan keuangan akhir tahun 2022.
10. Tersusunnya laporan keuangan semesteran yang terkoordinasi, terdiri dari 1 laporan keuangan semester I tahun 2023.
11. Meningkatnya pengetahuan bagi pegawai Bappenda sebanyak 70 orang.
12. Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan bimtek sebanyak 8 orang.
13. Terfasilitasinya komponen listrik/ penerangan untuk bangunan kantor, sebanyak 1 paket.
14. Terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor bagi pegawai perkantoran, sebanyak 1 paket.
15. Terpeliharanya kebersihan perkantoran dengan baik, sebanyak 2 paket.
16. Terpenuhinya kebutuhan logistik perkantoran, sebanyak 3 paket.
17. Terpenuhinya kebutuhan layanan operasional perkantoran, sebanyak 2 paket.
18. Terfasilitasinya tamu yang berkunjung, sebanyak 8 kegiatan/laporan.
19. Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi, sebanyak 108 laporan.
20. Tersedianya sarana kerja bagi pegawai, sebanyak 9 unit.
21. Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang representatif, sebanyak 1 unit Gudang arsip.

22. Terkelolanya surat menyurat melalui jasa layanan, sebanyak 4 laporan.
23. Terbayarkannya jasa komunikasi (telepon dan internet) dan listrik tepat waktu penggandaan, sebanyak 12 bulan/ laporan.
24. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik, sebanyak 10 unit.
25. Berfungsinya sarana dan prasarana peralatan kantor, sebanyak 50 unit.
26. Tersedianya dokumen target pendapatan yang terencana, terdiri dari 1 dokumen rencana target pendapatan daerah tahun 2024, dan 1 dokumen rencana perubahan target pendapatan daerah tahun 2023.
27. Tersedianya dokumen hukum dan atau kebijakan mengenai perpajakan, terdiri dari 1 dokumen peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan 1 dokumen draft perwal tentang pajak daerah.
28. Meningkatnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak, sebanyak 8 laporan kegiatan.
29. Tersedianya sistem pengelolaan pajak daerah yang efektif, terdiri dari e-PAD, SISMIOP, dan Host to Host.
30. Tersedianya data objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak yang telah terdaftar, sebanyak 3 laporan.
31. Tersedianya data pajak daerah yang valid, sebanyak 3 laporan.
32. Tersedianya data objek pajak yang disesuaikan NJOP nya, sebanyak 100 objek pajak.
33. Tersedianya data wajib pajak yang ditetapkan, sebanyak 117.571 dokumen.
34. Tersedianya data pajak daerah yang telah diteliti dan diverifikasi, sebanyak 118.724 dokumen.
35. Terlaksananya penagihan terhadap wajib pajak, sebanyak 1.400 dokumen.
36. Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, sebanyak 419 dokumen.

- 37. Meminimalisir wajib pajak yang tidak patuh/ taat, sebanyak 525 dokumen.
- 38. Tersedianya data penerimaan retribusi daerah hasil rekonsiliasi, sebanyak 13 laporan terdiri dari 12 laporan rekonsiliasi retribusi daerah dengan SKPD penghasil, dan 1 laporan rekonsiliasi terkait pajak daerah lainnya.
- 39. Tersedianya transaksi pembayaran pajak daerah secara elektronik/ digital, sebanyak 2 laporan.

3.1.1.5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dengan Tahun Lalu.

Berikut ini perbandingan capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2023 terhadap tahun 2022, yaitu :

Tabel 3.23
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Tahun Lalu
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023 Terhadap Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja		
		2023	2022	2023	2022	% Naik/ Turun
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,43 %	29,65 %	104,25 %	103,17 %	1,08 %
Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi Bappenda Kota Cimahi	90,86 Nilai	78,41 Nilai	302,87 %	100 %	202,87 %

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

1. Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan juga merupakan sasaran strategis kota, capaian kinerjanya dilihat dari persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya pada tahun 2023 sangat baik yaitu sebesar **30,43%** meningkat **0,78%**. Posisinya **39,57 %** masih dibawah provinsi jawa barat perbandingan dengan capaian pada tahun 2022. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya sudah melebihi harapan yaitu sebesar **104,25%** meningkat **1,08%** dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **102,39%**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi tahun 2023. Penilaian kriteria tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang** meningkat dari tingkat desentralisasi fiskal tahun sebelumnya yaitu berada di tingkat **Cukup**.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Target	28,74%	29,19%	
Realisasi	29,65%	30,43%	
Capaian Kinerja Tahun Ini (%)	103,17%	104,25%	Meningkat
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun lalu (%)		0,78%	Meningkat
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun lalu (%)		1,08%	Meningkat

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, capaian kinerjanya dilihat dari Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sangat baik yaitu mempunyai nilai sebesar **90,86** meningkat nilainya sebesar **12,45**. Posisinya **31,54 nilai** diatas rata-rata kabupaten/ kota. Capaian kinerjanya sudah melebihi harapan yaitu sebesar **302,87%** meningkat **202,87%** dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **259,60%**. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.25
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Keterangan
Target	N/A	30 Nilai	
Realisasi	78,41 Nilai	90,86 Nilai	
Capaian Kinerja Tahun Ini (%)	100%	302,87%	Meningkat
Peningkatan/ Penurunan Realisasi dari Tahun lalu (%)		12,45 Nilai	Meningkat
Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja dari Tahun lalu (%)		202,87%	Meningkat

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – non validasi).

3.1.1.6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra).

Hasil perbandingan sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra), diantaranya :

Tabel 3.26
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Kondisi Akhir
Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Kondisi Akhir Renstra (Tahun 2026)	% Capaian Kinerja	% Naik / Turun
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,43%	29,72%	102,39%	0,71%
Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik	Nilai RB Bappenda Kota Cimahi	90,86 Nilai	35 Nilai	259,60%	55,86 Nilai

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

1. Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan juga merupakan sasaran strategis kota, capaian kinerjanya dilihat dari persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya pada tahun 2023 sangat baik yaitu sebesar **30,43%** meningkat **0,78%**. Posisinya **39,57 %** masih dibawah provinsi jawa barat perbandingan capaian pada tahun 2022. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya sudah melebihi harapan yaitu sebesar **102,39%** menurun **8,58%** dari tahun sebelumnya, dikarenakan penentuan target pendapatan daerah terlalu rendah, namun penerimaan pendapatan sangat besar yang disebabkan dengan adanya faktor-faktor pendorong berupa kegiatan-kegiatan baru yang dapat mendongkrak terhadap penerimaan pendapatan daerah yang sangat signifikan. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar

102,39%, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi tahun 2023. Penilaian kriteria tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang** meningkat dari tingkat desentralisasi fiskal tahun sebelumnya yaitu berada di tingkat **Cukup**.

Tabel 3.27
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi target akhir renstra	Keterangan
Target	26,72%	29,19%	29,72%	
Realisasi	29,65%	30,43%		
Capaian Kinerja Tahun Berjalan (%)	110,97%	102,39%		
Capaian Kinerja Tahun ini Terhadap Target Akhir Renstra (%)		102,63%		Melebihi Batas Aman

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, capaian kinerjanya dilihat dari Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sangat baik yaitu mempunyai nilai sebesar **90,86** meningkat nilainya sebesar **12,45**. Posisinya **31,54 nilai** diatas rata-rata kabupaten/ kota. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sudah melebihi harapan yaitu sebesar **302,87%** meningkat **202,87%** dari tahun sebelumnya, dikarenakan untuk target renstra pada tahun sebelumnya tidak dapat diketahui maka capaian kinerjanya dinormalisasikan menjadi 100%. Capaian kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **259,60%**. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi

Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kondisi Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi target akhir renstra	Keterangan
Target	N/A	30 Nilai	35 nilai	
Realisasi	78,41 Nilai	90,86 Nilai		
Capaian Kinerja Tahun Ini (%)	100%	302,87%		
Capaian Kinerja Tahun ini Terhadap Target Akhir Renstra (%)		259,60%		Melebihi Batas Aman

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – non validasi).

3.1.1.7. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dengan Tingkat Provinsi.

Hasil perbandingan sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi dengan Tingkat Provinsi, diantaranya :

Tabel 3.29
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Level Provinsi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Rata-Rata Realisasi Kota/ Kabupaten	Perbandingan dengan Provinsi/ Rata-Rata Kota/ Kabupaten	Ket
Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30,43%	70%	-	39,57%	Posisi nya masih dibawah
Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik	Nilai RB Bappenda Kota Cimahi	90,86 Nilai	-	59,32 Nilai	31,54 Nilai	Posisi diatas rata-rata

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah)

1. Sasaran Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah.

Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan juga merupakan sasaran strategis kota, capaian kinerjanya dilihat dari persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya pada tahun 2023 sangat baik yaitu sebesar **30,43%** meningkat **0,78%**. Posisinya **39,57 %** masih dibawah provinsi jawa barat perbandingan dengan capaian pada tahun 2022. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya sudah melebihi harapan yaitu sebesar **102,39%** menurun **8,58%** dari tahun sebelumnya, dikarenakan penentuan target pendapatan daerah terlalu rendah, namun penerimaan pendapatan sangat besar yang disebabkan dengan adanya faktor-faktor pendorong berupa kegiatan-kegiatan baru yang dapat mendongkrak terhadap penerimaan pendapatan daerah yang sangat signifikan. Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu sebesar **102,39%**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi tahun 2023. Penilaian kriteria tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang** meningkat dari tingkat desentralisasi fiskal tahun sebelumnya yaitu berada di tingkat **Cukup**.

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Level Provinsi Sasaran
Strategis Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui
Optimalisasi Potensi Daerah
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	Realisasi Level Provinsi	Perbandingan dengan Level Provinsi	Keterangan
Target	29,72%			
Realisasi	30,43%	70%	39,57%	Masih dibawah
Capaian Kinerja Tahun Tahun dilaporkan (%)	102,39%			

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah - nonaudit BPK).

Capaian kinerja persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya pada tahun 2023 masih 39,57% dibawah provinsi yaitu realisasi persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 30,43% dan Tingkat provinsi pada tahun 2022 sebesar 70%.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas & Inovasi Pelayanan Publik.

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik, capaian kinerjanya dilihat dari Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sangat baik yaitu mempunyai nilai sebesar **90,86** meningkat nilainya sebesar **12,45**. Posisinya **31,54 Nilai** diatas rata-rata Kabupaten/ Kota. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sudah melebihi harapan yaitu sebesar **302,87%** meningkat **202,87%** dari tahun sebelumnya, dikarenakan untuk target renstra pada tahun sebelumnya tidak dapat diketahui maka capaian kinerjanya dinormalisasikan menjadi 100%. Capaian kinerja nilai evaluasi reformasi birokrasi di tahun 2023 melebihi target akhir rencana strategis yaitu

sebesar **259,60%**. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.31
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Rata-Rata Kota/ Kabupaten
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2023

Uraian	Tahun 2023	Rata-Rata Realisasi Kota/ Kabupaten	Perbandingan dengan Rata-Rata Kota/ Kabupaten	Keterangan
Target	30 Nilai			
Realisasi	90,86 Nilai	59,32 Nilai	31,54 Nilai	Diatas Rata-Rata
Capaian Kinerja Tahun Dilaporkan (%)	302,87%			

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah – non validasi).

Capaian kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sebesar 31,54 Nilai diatas rata-rata nasional yaitu realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi mempunyai nilai 90,86 dan rata-rata nasional sebesar 59,32 Nilai.

3.1.1.8. Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Keberhasilan dalam ketercapaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2023, mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang telah berhasil dicapainya, dimana Faktor-faktor keberhasilan yang telah dilakukannya, yaitu :

1. Sasaran strategis dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah, realisasi pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 30.941.587.230,47 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang mengalami penurunan sebesar

Rp. 10.428.271.982,58,- dari tahun 2021. Pada tahun 2023, indikator kinerja ini telah mencapai sebesar 104,25% yaitu dari target 29,19% dan terrealisasi 30,43%. Faktor-faktor keberhasilan tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh Keterlibatan dari Kejari Kota Cimahi dalam memberikan efek domino yang berdampak besar terhadap Wajib Pajak Daerah secara umum, Pendampingan dalam kegiatan pendataan potensi wajib pajak daerah yang baru bersama dengan Kepolisian Resort Kota Cimahi dan Subdenpom Kota Cimahi, serta dengan adanya bantuan hukum dari instansi vertikal Kejari Kota Cimahi.

2. Sasaran strategis dalam meningkatnya Kualitas dan inovasi Pelayanan Publik, realisasi nilai reformasi birokrasi meningkat sebesar 12,45 Nilai dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 78,41 Nilai. Pada tahun 2023, indikator kinerja ini telah mencapai sebesar 302,87% yaitu dari target Nilai 30 dan terrealisasi nilai 90,86, namun capaian ini terlalu besar dikarenakan dalam penentuan target kinerja yang terlalu rendah. Faktor-faktor keberhasilan tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh bimbingan teknis dari provinsi Jawa Barat dalam pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi setiap instrumen indikatornya, kolaborasi dengan evaluator setiap instrumen dalam memberikan data dan informasi yang akurat, serta ketercapaian realisasi target kegiatan-kegiatan dalam mendukung nilai reformasi birokrasi Bappenda Kota Cimahi.

3.1.1.9. Program-Program Terkait Sasaran Strategis

Program yang mendukung dalam rangka pencapaian Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kota Cimahi diantaranya instansi-instansi yang terkait, sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Pangan dan Pertanian
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Tenaga Kerja Dinas Perhubungan
9. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat

3.1.1.10. Analisis Efisiensi

Terdapat efisiensi atas capaian sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi, dikarenakan indikator kinerja utama sudah tercapai. Program yang mendukung pencapaian mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan juga dalam meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, meliputi 2 (dua) program, yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dan program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/ kota. Adapun efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 3,69% atau setara Rp. 516.463.390,-

Persentase efisiensi sumber daya biaya sasaran strategis tersebut, dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja daerah untuk Bappenda Kota Cimahi terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 13.597.134.766,- dan belanja modal sebesar Rp. 416.965.552,- sehingga total belanja sebesar Rp. 14.014.100.318,- terrealisasi sebesar Rp. 13.497.636.928,- dengan capaian sebesar 96,31%. Rincian anggaran tersebut dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Progam dan Kegiatan
Bappenda Kota Cimahi
Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.714.068.268	3.471.011.328	93,46
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.714.068.268	3.471.011.328	93,46
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.300.032.050	10.026.625.600	97,35
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.764.424	115.265.960	95,45
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.114.285.786	9.018.353.966	98,95
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.333.000	25.919.345	58,47
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.206.296	369.054.462	90,63
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.903.000	180.232.900	98,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.008.496	108.335.617	80,84
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.531.048	209.463.350	70,88
JUMLAH TOTAL		14.014.100.318	13.497.636.928	96,31

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran belanja program dan kegiatan sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yaitu, realisasi keuangan sebesar 96,31% bila dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun 2022 sebesar 94,11%, maka terjadi peningkatan penggunaan anggaran anggaran sebesar 2,20% atau adanya efisiensi anggaran 3,69%.

BAB IV P E N U T U P

Dari capaian kinerja yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target Perjanjian kinerja Tahun 2023 dan target pada akhir periode Renstra tahun 2023 – 2026 Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat tercapai, namun masih perlu adanya penyesuaian dalam penentuan target kinerjanya di setiap indikator kinerja. Kedepannya, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi akan memperkuat dan mempertajam regulasi agar lebih implementatif, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi stakeholders terkait baik internal maupun eksternal daerah Kota Cimahi sebagai Mitra Strategis dalam mengawal pencapaian kinerja.

Secara internal, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi melakukan penataan dan meningkatkan kompetensi SDM, serta memanfaatkan teknologi informasi memastikan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mampu mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Untuk itu, perencanaan strategis Tahun 2023 – 2026 yang berisi kinerja telah disusun dan dinamis terhadap perubahan yang ada, termasuk di dalamnya terdapat ukuran keberhasilan berupa indikator dan target pencapaiannya, serta strategi berupa program kegiatan untuk mencapai kinerja.

Cimahi, Maret 2024
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

MOHAMAD RONNY
NID 19691015 199003 1 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.**

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2023

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Pihak Pertama,

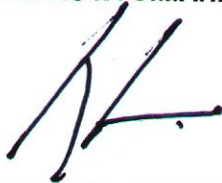
**KEPALA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	29,19%
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	30

Program	Anggaran
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.300.032.050,00
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.714.068.268,00
Jumlah Anggaran	Rp 14.014.100.318,00

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Cimahi, November 2023
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,

MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOCHAMAD RONNY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**

Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19670812 199403 2 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKTRETARIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB)
		Indeks Profesionalitas ASN	58 Nilai
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Nilai

KEGIATAN

ANGGARAN

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.300.032.050
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 120.764.424
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 9.114.285.786
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 44.333.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 407.206.296
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 183.903.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 134.008.496
		Rp 295.531.048

Pihak kedua,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670812 199403 2 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI IRAWAN, S.Pd.

Jabatan : Plh. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

**Plh. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 19690705 199612 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	2 kegiatan
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	70 orang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang
		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 bulan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 paket
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang diadakan	12 bulan
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
		Jumlah Bulan Barang Milik Daerah yang dipelihara	12 bulan
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 kendaraan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 alat

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.064.981.840
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 19.333.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 25.000.000
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.422.000
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 80.856.548
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 7.869.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 97.343.848
		Rp 61.793.900

8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	11.700.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	145.221.000
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	112.028.000
11	Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	71.875.000
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	103.598.496
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	30.410.000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	229.049.048
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	66.482.000

Pihak kedua,
**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670812 199403 2 009

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
**PIh. KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 19690705 199612 1 001



Nama : HERI IRAWAN, S.Pd.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk.I
NIP. 19670812 199403 2 009

PIHAK PERTAMA,

PERENCANA AHLI MUDA


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 19690705 199612 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan
		Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan	12 bulan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
		Jumlah Laporan KeuanganKeuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	1 laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

		Rp 9.235.050.210
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 53.552.512
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.439.800
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 2.465.300
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 2.710.000
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 2.440.000
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 8.849.500
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 49.307.312
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.066.543.574
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 46.233.212
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Rp 1.509.000

Pihak kedua,
**SEKRETARIS BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


Dra. UCEU PIPIP AVILLIA, MP
Pembina Tk. I
NIP. 19670812 199403 2 009

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
PERENCANA AHLI MUDA


HERI IRAWAN, S.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 19690705 199612 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI PENDAPATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVI DIRGANTINI, SH., MM

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOCHAMAD RONNY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

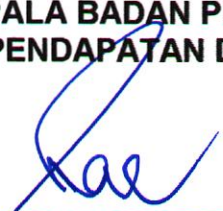
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG
IDENTIFIKASI PENDAPATAN**


NOVI DIRGANTINI, SH., MM
Pembina

NIP. 19801126 200212 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase (%) Peningkatan Target Pajak Daerah	- 0,32

KEGIATAN

ANGGARAN

1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 2.640.244.368
Rp 2.640.244.368

Pihak kedua,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH



NOVI DIRGANTINI, SH., MM
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI
PAJAK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN DHARMMABUDHI WIRAKUSUMAH, S.STP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVI DIRGANTINI, SH., MM

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG
IDENTIFIKASI PENDAPATAN**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI PAJAK
DAERAH**

RADEN DHARMMABUDHI WIRAKUSUMAH, S.STP
Penata
NIP. 19900225 201206 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

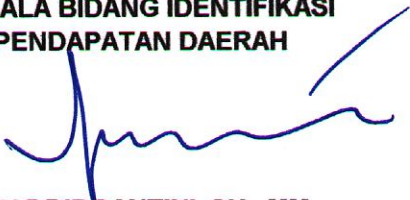
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi WP	117.500 WP
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 unit
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 laporan

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 1.034.985.678
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 125.692.764
3	Sub Kegiatan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp 784.924.414
		Rp 124.368.500

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH



NOVI DIRGANTINI, SH., MM
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN
DAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH



RADEN DHARMABUDHI WIRAKUSUMAH, S. STP
Penata
NIP. 19900225 201206 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TUTUS HADIANA, SE., MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVI DIRGANTINI, SH., MM

Jabatan : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG
IDENTIFIKASI PENDAPATAN**

NOVI DIRGANTINI, SH., MM

Pembina

NIP. 19801126 200212 2 002

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENETAPAN**

TUTUS HADIANA, SE., MM

Penata Tk. I

NIP. 19730425 200604 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi WP	117.500 WP
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	3 laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 laporan
		Jumlah Pajak yang disesuaikan NJOP nya	145 OP
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	117.500 dokumen
		Jumlah data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	118.700 dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 1.605.258.690
2	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 446.297.992
3	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 61.909.964
4	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 95.999.678
5	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 825.101.250
		Rp 175.949.806

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG IDENTIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH



NOVI DIRGANTINI, SH., MM
Pembina
NIP. 19801126 200212 2 002

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENETAPAN



TUTUS HADIANA, SE., MM
Penata Tk. I
NIP. 19730425 200604 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MOCHAMAD RONNY

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH**

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN**

FAISAL, S.Sos
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENERIMAAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase (%) Realisasi Pajak Daerah	100,00%

KEGIATAN

ANGGARAN

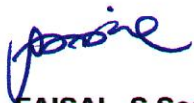
1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rp 1.073.823.900
Rp 1.073.823.900

Pihak kedua,
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH


MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN


FAISAL, S.Sos
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI SUSANTO, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FAISAL, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN**

FAISAL, S.Sos
Pembina

NIP. 19760201 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN,
PENAGIHAN DAN KEBERATAN**

HERI SUSANTO, SE
Penata Tk. I

NIP. 19800330 200501 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN, PENAGIHAN, DAN KEBERATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi WP	117.500 WP
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1400 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Daerah	419 dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	13 dokumen

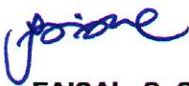
SUB KEGIATAN

- 1 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- 2 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- 3 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

ANGGARAN

Rp	470.705.400
Rp	265.979.000
Rp	116.411.000
Rp	88.315.400

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN


FAISAL, S. Sos
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN,
PENAGIHAN DAN KEBERATAN


HERI SUSANTO, SE
Penata Tk I
NIP. 19800330 200501 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REDI RESTIAN, S.IP., MAP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FAISAL, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

**KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN**

FAISAL, S.Sos
Pembina

NIP. 19760201 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH**

REDI RESTIAN, S.IP., MAP
Penata Tk. I

NIP. 19771214 200501 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN PAJAK DAERAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi WP	117.500 WP
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Daerah	2 dokumen
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	525 dokumen

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 603.118.500
2	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 188.959.500
3	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 157.739.000
		Rp 256.420.000

Pihak kedua,
KEPALA BIDANG PENERIMAAN
DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN


FAISAL, S.Sos
Pembina
NIP. 19760201 200501 1 006

Cimahi, Oktober 2023
Pihak pertama,
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PENYULUHAN
PAJAK DAERAH


REDI RESTIAN, S. IP., MAP
Penata Tk. I
NIP. 19771214 200501 1 009



KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH
NOMOR : 800 / 12 / Bappenda

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH
TAHUN 2023

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban Pemerintah yang berisi target perencanaan, pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas laporan kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya;
- b. bahwa Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengatakan bahwa Wali Kota menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahunan, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).
9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan tim penyusun tingkat Kota terkait dengan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;
3. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

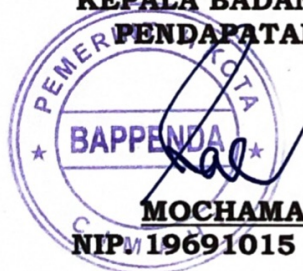
Adapun uraian tugas masing-masing anggota Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**



MOCHAMAD RONNY
NIP. 19691015 199003 1 011

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800 / 12 / Bupenda

TANGGAL : 5 Januari 2024

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023**

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Kepala Badan
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Badan
- III. Ketua : Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan.
- V. Anggota :
1. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
 2. Kepala Subbid Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan
 3. Kepala Subbid Pengawasan, Pengendalian, dan Pengawasan Pajak Daerah
 4. Kepala Subbid Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
 5. Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
 6. Fungsional Perencana Ahli Muda
 7. Fungsional Perencana Ahli Pertama
 8. Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 9. Analis Rencana Program dan Kegiatan
 10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 11. Analis Perencanaan
 12. Analis Pajak Daerah
 13. Analis Pemeriksaan Pajak Daerah
 14. Kustodian Barang Milik Daerah

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**



MOCHAMAD RONNY

NIP. 19691015 199003 1 011

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 800 / 12 / Bappinda

TANGGAL : 5 Januari 2021

TENTANG : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) PADA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023**

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah** : 1. Memberikan pengarah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memberikan masukan dan memantau secara langsung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- II. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- III. Ketua** : 1. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan seluruh kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
- IV. Sekretaris** : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan seluruh tugas kesekretariatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- V. Anggota** : 1. Mengolah, menginventarisasi dan mengumpulkan data-data dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,**



MOCHAMAD RONNY

NIP. 19691015 199003 1 011